

Analisis Fungsi Koordinasi Kepala Desa Guna Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi

Erna Ningsih Laowo¹, Fatolosa Hulu², Palindungan Lahagu³, Syah Abadi Mendrofa⁴

¹²³⁴Fakultas Ekonomi Universitas Nias, Gunungsitoli, Indonesia

Alamat ningsiherna746@gmail.com¹, fatoshulu@gmail.com², lindunglahagu25@gmail.com³, syahabadi.mendrofa@gmail.com⁴

Info Artikel

Diterima : Tgl
22 Nopember 2024

Revisi : Tgl
5 Desember 2024

Terbit : Tgl
27 Desember
2024

Key words:

Coordination,
Development,
Village

Kata Kunci:

Koordinasi,
Pembangunan,
Desa

Corresponding

Author :

Erna Ningsih
Laowo¹, Fatolosa
Hulu²,
Palindungan
Lahagu³, Syah
Abadi Mendrofa⁴
. E-mail :
ningsiherna746@
gmail.com¹,
fatoshulu@gmail.
com²,
lindunglahagu25
@gmail.com³,
syahabadi.mendr
ofa@gmail.com⁴

Abstract

This research aims to examine the coordination function of the village head in improving development in Sifalaete Village, Gunungsitoli Idanoi District, particularly in the context of village development planning. Additionally, the study seeks to identify the challenges faced by the village head in coordinating efforts to enhance village development. The phenomenon observed is that the village head's coordination in Sifalaete Village still encounters various challenges, including limited resources, lack of community participation, and ineffective coordination among involved parties. One of the main challenges identified is the disagreement of the Village Consultative Body (BPD) in signing the village development planning approval letter, which seriously impacts the development process in the village. This study employs a qualitative research method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation from various parties involved in the development process in Sifalaete Village. The findings indicate that the coordination function of the village head plays a crucial role in enhancing the effectiveness and efficiency of village development. However, there are significant challenges, such as ineffective communication between the village head and the BPD and low community participation in the development planning process. Based on the research findings, it is recommended that the village head and BPD improve cooperation and harmonious communication in planning and implementing village development. Moreover, efforts should be made to increase community participation at every stage of development to ensure a smoother process and more optimal outcomes. Better coordination is expected to address existing challenges and drive more effective development goals in Sifalaete Village.

Keywords: Coordination, Development, Village

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fungsi koordinasi kepala desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Sifalaete, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, khususnya dalam konteks perencanaan pembangunan desa. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi kepala desa dalam melaksanakan koordinasi guna meningkatkan pembangunan di desa tersebut. Fenomena yang dihadapi adalah bahwa koordinasi kepala desa di Desa Sifalaete masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya, kurangnya partisipasi masyarakat, serta koordinasi yang kurang efektif antara berbagai pihak yang terlibat. Salah satu kendala utama yang diidentifikasi adalah ketidaksetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menandatangani surat persetujuan perencanaan pembangunan, yang berdampak serius terhadap proses pembangunan di desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembangunan di Desa Sifalaete. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi koordinasi kepala desa memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan desa. Namun, terdapat beberapa kendala yang

signifikan, seperti kurangnya komunikasi yang efektif antara kepala desa dan BPD, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar kepala desa dan BPD meningkatkan kerjasama dan komunikasi yang harmonis dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Selain itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembangunan agar proses pembangunan dapat berjalan lebih lancar dan hasilnya lebih optimal. Koordinasi yang lebih baik diharapkan dapat mengatasi berbagai kendala yang ada dan mendorong tercapainya tujuan pembangunan yang lebih efektif di Desa Sifalaete

Kata Kunci: Koordinasi, Pembangunan, Desa

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dalam berbagai aspek, baik aspek ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan. Kepala desa memiliki peran penting dalam meningkatkan pembangunan desa. Kepala desa merupakan pemimpin tertinggi di desa yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menggerakkan dan mengoordinasikan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa merupakan proses penyusunan rencana pembangunan desa yang disusun secara bertahap dan sistematis untuk mencapai tujuan pembangunan desa.

Menurut Afandi (2018:120) koordinasi adalah usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit unit organisasi agar tertuju untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan, dengan adanya koordinasi akan terdapat keselarasan aktivitas di antara unit-unit organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Dalam bidang ilmu administrasi atau manajemen, koordinasi merupakan salah satu fungsi yang penting. Henry Fayol, Luther Gullick, dan beberapa ahli lainnya dalam ilmu administrasi atau manajemen menganggap koordinasi atau pengkoordinasian ini sebagai fungsi organik yang krusial dari administrasi atau manajemen. Dalam karya Isye Regina Altje Manoppo, dkk pada tahun 2017, fungsi-fungsi administrasi atau manajemen menurut Fayol adalah: perencanaan, pengorganisasian, pemberian komando, pengkoordinasian, dan pengawasan. S.P Hasibuan (2016:85) dalam kutipan Isye Regina Altje Manoppo, dkk 2017 mendefinisikan Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks ini, dengan melakukan koordinasi yang efektif, perencanaan pembangunan juga akan menjadi efektif.

Berdasarkan aspek pembangunan tersebut, kepala desa tidak hanya berperan sebagai pemimpin administratif, tetapi juga sebagai koordinator berbagai program dan kegiatan pembangunan di desa mengambil keputusan. Istilah "koordinasi" dalam bahasa Inggris dikenal sebagai "coordination." Istilah "coordination" terbentuk dari dua kata, yaitu "co," yang berarti "bersama," dan "ordination," yang berarti "memerintah." Jadi, "coordination" dapat diartikan sebagai "memerintah bersama."

Dalam mencapai tujuan pembangunan tersebut, kepala desa memegang peran yang sangat vital. Dalam merencanakan suatu program pembangunan, masyarakat harus menjadi prioritas utama dan benar-benar terlibat dalam proses perencanaan tersebut. Selni Paru, dkk (2019) mengutip pendapat Soetomo (2006:7) yang menyatakan bahwa : "Dalam melakukan pembangunan infrastruktur maka masyarakat haruslah dipandang sebagai subjek dan objek dari pembangunan itu untuk mencapai hasil yang diharapkan, atau pembangunan yang memanusiaikan manusia, karena yang lebih penting bukan bagaimana hasilnya secara material, melainkan bagaimana prosesnya sehingga hasil tadi diperoleh, apakah sudah melibatkan masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan atau tidak". Pembangunan infrastruktur adalah komponen penting dalam upaya pembangunan desa agar desa tersebut memiliki sarana dan prasarana yang memadai, atau setidaknya infrastruktur yang mendukung kemajuan masyarakat.

Desa Sifalaete, yang terletak di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, adalah salah satu desa yang terus berupaya meningkatkan kualitas hidup warganya melalui berbagai program pembangunan. Dalam konteks ini, peran kepala desa sebagai koordinator sangatlah krusial. Kepala desa harus mampu menggerakkan seluruh potensi yang ada di desa, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, untuk mencapai pembangunan yang optimal.

Namun, berdasarkan hasil observasi peneliti, pelaksanaan fungsi koordinasi kepala desa di Desa Sifalaete masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya, kurangnya partisipasi masyarakat, dan koordinasi yang kurang efektif antara berbagai pihak yang terlibat. Salah satu kendala utama yang muncul adalah ketidaksetujuan BPD dalam menandatangani surat persetujuan perencanaan pembangunan. Ketidaksepakatan ini menimbulkan dampak serius terhadap proses pembangunan di Desa Sifalaete.

Kepala Desa sebagai pemimpin utama dan BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat perlu menjalin kerjasama yang harmonis untuk mencapai tujuan pembangunan yang optimal. Oleh karena itu, analisis fungsi koordinasi kepala desa menjadi penting dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan di Desa Sifalaete.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi koordinasi kepala desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Sifalaete. Dengan memahami peran dan tantangan yang dihadapi oleh kepala desa dalam menjalankan fungsi koordinasinya, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan memaksimalkan potensi pembangunan di desa ini.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk menetapkan sebuah judul penelitian yang berjudul "Analisis Fungsi Koordinasi Kepala Desa Guna Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi".

METODE PENELITIAN

➤ Subyek penelitian

Penelitian ini mengkaji fungsi koordinasi kepala desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Sifalaete, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi. Fokus penelitian mencakup peran kepala desa dalam perencanaan pembangunan, kendala yang dihadapi, serta strategi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi kendala tersebut.

➤ Prosedur

Penelitian dilakukan dalam beberapa tahap:

Pengumpulan Data

Lokasi Penelitian: Desa Sifalaete, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.

Teknik Pengumpulan Data:

1. Wawancara: Dilakukan kepada Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun, dan Tokoh Masyarakat.
2. Observasi: Peneliti mengamati langsung proses pembangunan dan kegiatan koordinasi di desa.
3. Dokumentasi: Pengumpulan data tambahan berupa dokumen resmi, foto, dan laporan kegiatan.

Analisis Data:

1. Pengumpulan: Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti mencatat informasi deskriptif (data apa adanya) dan reflektif (analisis dari sudut pandang peneliti).

2. Reduksi: Data yang tidak relevan dihapus, sementara data penting diseleksi berdasarkan fokus penelitian, seperti komunikasi, partisipasi, dan kendala koordinasi.
3. Penyajian: Informasi yang relevan disusun dalam bentuk narasi dan tabel untuk menunjukkan hubungan antarindikator (komunikasi, kesepakatan, partisipasi, dll.).
4. Penarikan Kesimpulan: Dilakukan berdasarkan analisis pola dan keterkaitan data. Kesimpulan diverifikasi melalui diskusi ulang dan konfirmasi dengan catatan lapangan.

➤ Instrumen

1. Instrumen Utama:

Dalam penelitian ini, instrumen utama adalah peneliti itu sendiri. Peneliti bertindak sebagai alat pengumpul data utama yang berperan dalam merancang, melaksanakan, dan menganalisis seluruh proses penelitian. Sebagai instrumen utama, peneliti memiliki tugas untuk:

1. Menyusun pedoman wawancara.
2. Melakukan observasi langsung di lokasi penelitian.
3. Mencatat hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi secara detail.
4. Menafsirkan data berdasarkan temuan lapangan.

2. Pedoman Wawancara:

Pertanyaan disusun berdasarkan indikator Komunikasi, Kesadaran Pentingnya Koordinasi, Partisipan, Kesepakatan, Komitmen, Kontinuitas perencanaan.

➤ Teknik Analisa data

1. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui tiga metode utama:

- a. Wawancara: Dilakukan dengan informan kunci, seperti Kepala Desa, Ketua BPD, Kepala Dusun, dan tokoh masyarakat. Wawancara bertujuan untuk menggali informasi mendalam terkait koordinasi kepala desa dalam pembangunan.
- b. Observasi: Peneliti mengamati secara langsung aktivitas koordinasi dan proses pembangunan di Desa Sifalaete.
- c. Dokumentasi: Mengumpulkan data berupa dokumen resmi, foto kegiatan, serta arsip yang relevan dengan penelitian.

2. Reduksi Data

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan proses seleksi dan penyederhanaan untuk fokus pada informasi yang relevan. Proses ini melibatkan:

- a. Penyusunan data menjadi pola-pola tertentu sesuai indikator penelitian (komunikasi, partisipasi, kesepakatan, komitmen, dan kontinuitas perencanaan).
- b. Menghilangkan data yang tidak relevan atau tidak mendukung tujuan penelitian.
- c. Menyusun data menjadi lebih terfokus untuk mempermudah analisis.

3. Penyajian Data

Data yang telah diringkas disajikan dalam bentuk:

- a. Narasi deskriptif: Untuk menggambarkan hasil wawancara dan observasi.
- b. Tabel dan diagram: Untuk memvisualisasikan hubungan antara fungsi koordinasi dan dampaknya terhadap pembangunan.
- c. Kerangka Berpikir: Disajikan untuk menunjukkan hubungan antara variabel yang diteliti.

4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan ditarik berdasarkan temuan yang telah dianalisis. Proses ini meliputi:

- a. Identifikasi pola atau tema yang muncul dari data.
- b. Verifikasi kesimpulan dengan meninjau ulang data dan melakukan diskusi dengan informan atau pihak terkait.
- c. Menghubungkan hasil penelitian dengan teori yang digunakan, seperti fungsi koordinasi menurut para ahli.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi penelitian bermanfaat untuk memaparkan semua data dan informasi yang diperoleh dari lokasi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2024 di Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, peneliti telah memperoleh data-data yang berhubungan dengan topik pembahasan pada penelitian ini, sebagaimana dijelaskan berikutnya.

Desa Sifalaete adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli. Asal muasal diberikan nama Desa Sifalaete adalah pada zaman dahulu ada dua kelompok masyarakat yang berada pada wilayah tersebut, serta pemukiman penduduk yang berlapis-lapis. Mengingat di tempat tersebut sudah ada

penduduk dan wilayah maka para leluhur memandang perlu membuat suatu aturan atau sebutan nama pada suatu wilayah/desa sehingga pada suatu saat mereka berkumpul bersama antara beberapa tokoh diantaranya, tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita dan tokoh pemuda merumuskan, menetapkan dan mendapatkan satu Kesimpulan menamai desa tersebut adalah Desa Sifalaete.

Setelah kesepakatan nama Desa Sifalaete muncul maka muncullah seorang pemimpin yang disebut Kepala Kampung(*Salawa Hada*) dan di percaya untuk memimpin kampung. Seiring dengan perkembangan sistim pemerintahan negara, istilah kampung dilebur menjadi desa, sehingga yang menjadi pemimpin disebut dengan istilah kepala desa.

Perlu diketahui bahwa Desa Sifalaete ini termasuk desa tertua disekitarnya yang sampai saat ini terdiri dari 3 (tiga) dusun dengan total jumlah penduduk yang tercatat sejumlah 734 jiwa yang terdiri atas 348 orang laki-laki dan 386 perempuan. Sejak berdirinya desa ini telah terjadi pergantian Kepala Desa dari waktu kewaktu hingga pada tahun 2018 kembali diadakan pemilihan kepala desa secara demokratis dan terakhir pada pemilihan kepala desa tahun 2018 masa jabatan 2019 s/d 2024 yang terpilih kepala desa adalah Ekaman Laowo, S.Pd.

Visi adalah tujuan atau arah utama yang ingin dicapai oleh suatu lembaga atau instansi, organisasi, sedangkan misi adalah suatu proses atau tahapan yang seharusnya dilalui oleh suatu lembaga atau instansi atau organisasi dengan tujuan agar bisa mencapai visi tersebut. Visi dan Misi Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi adalah sebagai berikut :

1) Visi

Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang transparan dan mewujudkan masyarakat Desa Sifalaete yang tentram, Maju, Makmur dan Adil.

2) Misi.

1. Membangun Kerohanian di Desa Sifalaete Melalui: PA (pembelajaran Alkitab) dan Koor /Vokal Group;
2. Melaksanakan Percepatan /Melanjutkan program-program Pemerintah yang ada ataupun yang masuk di Desa Sifalaete;
3. Melaksanakan percepatan pembangunan di Desa Sifalaete yang Transfran sesuai dengan Peraturan perundang-undangan;
4. Memfasilitasi Pengadaan Penerangan lampu jalan di Desa Sifalaete Melalui Instansi terkait (dalam hal ini PLN);
5. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui BUMDES UKM Serta Meningkatkan Kapasitas Petani di Desa Sifalaete;
6. Mewujudkan Pemuda yang kreatif , Inovatif, Maju dan Berkualitas;

7. Memfasilitasi/mendukung Program-program lansia sendoro, Pemuda/l, dan seluruh organisasi yang ada di Desa Sifalaete sebagai wahana untuk menyalurkan bakat /hobi, menyalurkan ide/ gagasan dan berkreasi;
8. Memanfaatkan sumberdaya alam dalam membangun Desa yang berkelanjutan;
9. Melayani seluruh masyarakat Desa Sifalaete dengan tulus dan penuh tanggung jawab.

Karakteristik Informan

Pada uraian ini peneliti mengemukakan data penelitian yang merupakan data hasil yang diperoleh peneliti di lokasi penelitian, yaitu: di Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, khususnya menjelaskan dan menganalisis Peran Komunikasi Aparatur Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli. Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti sendiri kepada Kepala Desa Sifalaete. Sebagai narasumber dalam mengadakan observasi secara langsung pada lokasi penelitian guna memperoleh data secara langsung yang berhubungan dengan masalah penelitian. Peneliti akan menguraikan pembahasan secara teoritis maupun secara langsung pada objek penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi identitas narasumber adalah: nama, pendidikan terakhir, dan jabatan. Dalam penelitian ini narasumber berjumlah 7 orang yaitu: Kepala Desa dan Aparat Desa Sifalaete. Yang disajikan peneliti pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Nama - Nama Informan Kunci

No	Nama	Jabatan
1	Ekaman Laowo,S.Pd	Kepala Desa

Sumber: Olahan Penulis, 2024

Tabel 4.2
Nama - Nama Informan Pendukung

No	Nama	Jabatan
1	Nafao Laowo	Ketua BPD
2	Alfinus Laowo	Kepala Dusun 1
3	Heseziduhu Laowo	Kepala Dusun 2
4	Folo'o Laowo	Tokoh Masyarakat
5	Lentriman laowo	Tokoh Masyarakat

Sumber: Olahan Penulis, 2024

Hasil Penelitian

Hasil penelitian merupakan suatu karya tulis ilmiah yang mengandung informasi atau keterangan yang didapat selama melaksanakan kegiatan penelitian dilapangan. Informasi atau keterangan tersebut didapat melalui wawancara mendalam secara langsung kepada informan, observasi dan dokumentasi sesuai dengan acuan yang telah ditetapkan . objek penelitian yang digunakan yaitu di Kantor Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi yang dimana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi koordinasi kepala desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, terutama dalam perencanaan pembangunan desa Untuk menganalisis kendala yang dihadapi kepala desa dalam melaksanakan koordinasi untuk meningkatkan pembangunan di desa sifalaete kecamatan gunungsitoli idanoi.

Berdasarkan teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan penelitian, maka peneliti melaksanakan tahapan-tahapan tersebut dengan menggunakan draf wawancara sehingga didapatkan data dari informan yaitu terdiri dari 1 orang Kepala Desa Sifalaete, 1 orang Ketua BPD Desa Sifalaete, 2 orang Kepala Dusun Desa Sifalaete dan 2 orang Tokoh Masyarakat Desa Sifalaete sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Sifalaete, komunikasi antara Kepala Desa dan masyarakat dinilai cukup efektif. Hal ini diwujudkan melalui penyampaian rencana yang jelas, keterbukaan terhadap masukan, dan dialog terbuka untuk mengatasi perbedaan pendapat. Untuk memastikan komunikasi berjalan lancar, Kepala Desa mengadakan rapat rutin, memanfaatkan grup WhatsApp sebagai media penyebaran informasi cepat, dan sering melakukan kunjungan langsung ke lapangan guna mendengar aspirasi masyarakat secara langsung. Namun, tantangan utama dalam komunikasi adalah ketidaksepahaman antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan perangkat desa. Untuk mengatasi ini, dilakukan pertemuan rutin dan diskusi terbuka guna menciptakan pemahaman yang lebih baik dan mengurangi potensi konflik.

Kesadaran akan pentingnya koordinasi dinilai cukup merata di kalangan aparatur desa, meskipun masyarakat masih memerlukan sosialisasi tambahan untuk meningkatkan pemahaman mereka. Kepala Desa

menekankan bahwa koordinasi merupakan kunci utama dalam proses pembangunan desa, karena memungkinkan seluruh elemen masyarakat, seperti perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat, untuk bekerja sama memahami kebutuhan warga dan memastikan pelaksanaan program yang efektif. Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kesadaran ini meliputi pertemuan rutin antara pemerintah desa dan masyarakat serta melibatkan tokoh masyarakat dan kepala dusun dalam diskusi tentang tanggung jawab pembangunan.

Dalam proses koordinasi, Kepala Desa berperan sentral dengan melibatkan BPD, tokoh masyarakat, kepala dusun, dan kelompok masyarakat lainnya. Rapat desa dan diskusi terbuka menjadi sarana untuk memastikan bahwa setiap suara masyarakat didengar dan dipertimbangkan. Meskipun ada kendala, seperti kurangnya partisipasi beberapa masyarakat, pendekatan melalui sosialisasi intensif dan forum diskusi telah terbukti meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan. Kesepakatan dalam rencana pembangunan dicapai melalui musyawarah desa yang inklusif, dengan transparansi dan komunikasi yang intensif untuk memastikan semua pihak merasa dihargai.

Dalam menghadapi perbedaan pendapat atau konflik, Kepala Desa menggunakan pendekatan berbasis konsensus, melalui diskusi terbuka yang melibatkan seluruh pihak. Komitmen semua pihak, termasuk Kepala Desa, perangkat desa, dan masyarakat, dianggap sangat penting untuk keberhasilan pembangunan. Komitmen ini dijaga dengan memastikan transparansi dalam pelaksanaan program, pemantauan rutin, dan evaluasi berkala. Sebagai contoh, program pembangunan jalan desa berhasil dilaksanakan karena adanya komitmen dan kerja sama yang kuat dari semua pihak, yang memberikan dampak positif bagi akses transportasi dan ekonomi desa.

Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan, perencanaan dilakukan secara kontinu melalui musyawarah tahunan dan evaluasi berkala. Sistem dokumentasi dan pelatihan aparatur desa juga diterapkan untuk memastikan kesinambungan perencanaan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan. Evaluasi terhadap rencana yang telah dijalankan dilakukan melalui pertemuan dengan masyarakat dan pemantauan implementasi program, sehingga keberlanjutan pembangunan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan komitmen Kepala Desa untuk menjadikan pembangunan di Desa Sifalaete berkelanjutan dan inklusif.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), komunikasi antara Kepala Desa dan masyarakat dinilai cukup berjalan, meskipun masih bisa ditingkatkan. Salah satu tantangan utama dalam komunikasi adalah kurangnya transparansi dan keterbukaan dari Kepala Desa dan Kepala Dusun, yang menyulitkan BPD dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas dan pemberi saran. Kesadaran tentang pentingnya koordinasi juga belum sepenuhnya merata, terutama di kalangan masyarakat, meskipun aparatur desa menunjukkan pemahaman yang lebih baik. Ketua BPD menilai bahwa koordinasi di Desa Sifalaete sering kali kurang efektif karena keputusan sering diambil tanpa konsultasi yang memadai, menyebabkan kesalahpahaman dalam pelaksanaan program pembangunan.

Langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya koordinasi dinilai masih terbatas dan hanya bersifat formalitas, tanpa memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berkontribusi. Selain itu, keterlibatan partisipan seperti tokoh masyarakat dan pemuda masih kurang berdampak signifikan, dan masukan dari BPD serta masyarakat sering kali kurang dipertimbangkan. Proses musyawarah untuk mencapai kesepakatan juga menghadapi kendala, seperti ketidakmerataan dalam pengumpulan aspirasi, yang dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

Ketua BPD menyoroti pentingnya komitmen dari semua pihak dalam proses koordinasi pembangunan. Namun, pelaksanaannya sering menghadapi kendala, seperti kurangnya sinergi antara BPD dan Kepala Desa. Contoh konkret komitmen yang berhasil terlihat dalam pembangunan jalan desa, meskipun partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan. Untuk memastikan keberlanjutan pembangunan, BPD merekomendasikan pelibatan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan evaluasi, meskipun upaya menjaga kesinambungan sering terganggu oleh pergantian aparatur desa. Evaluasi terhadap rencana yang dijalankan sering kali tidak optimal karena kurangnya transparansi, sehingga diperlukan mekanisme yang lebih terstruktur untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas pembangunan desa.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dusun 1 dan 2 di Desa Sifalaete, komunikasi antara kepala desa dan masyarakat dinilai masih perlu diperbaiki. Meskipun informasi telah disampaikan melalui rapat koordinasi dan musyawarah, penjelasan terkadang kurang dipahami oleh sebagian warga. Tantangan komunikasi juga mencakup ketegangan antara BPD dan aparatur desa, yang disebabkan oleh kurangnya

transparansi dan keterlambatan persetujuan program. Untuk mengatasi ini, dilakukan peningkatan frekuensi komunikasi melalui forum musyawarah yang lebih inklusif.

Koordinasi pembangunan melibatkan kepala desa, BPD, kepala dusun, dan masyarakat, tetapi kadang mengalami ketegangan terkait pengambilan keputusan. Kepala dusun berperan penting menjaga komitmen pelaksanaan program, meskipun keterbatasan sumber daya dan kurangnya partisipasi masyarakat menjadi kendala. Untuk menjaga kesinambungan perencanaan, diterapkan strategi seperti dokumentasi dan pelatihan aparatur baru, namun adaptasi aparatur baru sering memerlukan waktu lebih lama, yang berpotensi menghambat implementasi program.

Evaluasi program dilakukan secara berkala dengan melibatkan masyarakat, namun keterbatasan waktu dan sumber daya sering membuat evaluasi kurang optimal. Meskipun ada tantangan, komitmen yang kuat dari berbagai pihak telah membawa perubahan positif, seperti pembangunan balai desa baru yang mendukung kegiatan masyarakat. Namun, komunikasi dan koordinasi antara BPD dan kepala desa masih perlu ditingkatkan agar pembangunan lebih efektif dan inklusif. Kepala dusun juga berperan sebagai mediator dalam mengatasi perbedaan pendapat untuk mencapai konsensus yang adil bagi semua pihak.

Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat di Desa Sifalaete, komunikasi yang efektif dinilai penting untuk memastikan kelancaran pembangunan desa. Tokoh masyarakat merasa bahwa keterlibatan mereka dalam rapat dan forum desa merupakan salah satu cara untuk menyampaikan pendapat, meskipun terkadang kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan harapan. Mereka berharap pemerintah desa dapat lebih mendengarkan keluhan dan memberikan penjelasan yang lebih mudah dipahami. Namun, ada perasaan bahwa masukan dari masyarakat sering kali tidak dijadikan prioritas dalam pengambilan keputusan, sehingga diperlukan peningkatan dalam cara pemerintah desa mengakomodasi berbagai pendapat.

Kesadaran tentang pentingnya koordinasi dinilai masih perlu ditingkatkan, terutama di kalangan masyarakat yang sering merasa bingung dengan manfaat nyata dari koordinasi tersebut. Meski aparatur desa menunjukkan kemajuan, masyarakat berharap pendekatan yang lebih inklusif dan menyeluruh dapat diterapkan. Langkah-langkah yang telah diambil, seperti pertemuan dan diskusi, dinilai belum sepenuhnya

efektif, sehingga tokoh masyarakat menyarankan adanya pelatihan dan pemberdayaan untuk meningkatkan pemahaman semua pihak tentang pentingnya koordinasi.

Kendala yang dihadapi dalam melibatkan masyarakat termasuk keterbatasan waktu dan kesibukan warga, yang sering kali menghambat kehadiran dalam rapat desa. Untuk mengatasi hal ini, mereka mengusulkan fleksibilitas jadwal pertemuan dan penggunaan teknologi informasi agar partisipasi masyarakat dapat lebih optimal. Dalam proses mencapai kesepakatan, kurangnya transparansi dan komunikasi menjadi hambatan utama. Keputusan sering diambil tanpa melibatkan masyarakat secara langsung, sehingga tidak selalu mencerminkan aspirasi mereka. Tokoh masyarakat mengusulkan perlunya lebih banyak dialog terbuka dan transparansi dalam setiap tahap perencanaan agar kesepakatan yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan efektivitas pembangunan di Desa Sifalaete.

Reduksi Data Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan, komunikasi antara kepala desa dan masyarakat di Desa Sifalaete telah berjalan, namun efektivitasnya masih memerlukan peningkatan. Kepala desa menggunakan berbagai metode, seperti rapat rutin, grup WhatsApp, dan musyawarah, untuk menyampaikan informasi. Namun, beberapa warga merasa penjelasan yang diberikan kurang jelas, sehingga sulit dipahami. Selain itu, perbedaan pandangan antara kepala desa, BPD, dan aparatur desa lainnya menjadi tantangan utama yang memengaruhi efektivitas komunikasi. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan transparansi yang lebih baik serta komunikasi yang lebih intensif dan partisipatif.

Kesadaran akan pentingnya koordinasi dinilai cukup merata di kalangan aparatur desa, tetapi masih bervariasi di masyarakat. Aparatur desa menunjukkan pemahaman yang baik tentang perlunya bekerja sama, namun masyarakat masih membutuhkan sosialisasi lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman mereka. Kepala desa telah berupaya melibatkan masyarakat melalui sosialisasi rutin dan diskusi, tetapi langkah-langkah ini dianggap belum sepenuhnya efektif oleh beberapa pihak. Diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan agar seluruh elemen masyarakat dapat memahami dan mendukung pentingnya koordinasi.

Dalam proses koordinasi, kepala desa memainkan peran sentral sebagai pengarah utama, sementara BPD bertindak sebagai mitra strategis dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan. Namun, hubungan antara kepala desa dan BPD sering menghadapi ketegangan akibat kurangnya transparansi dan koordinasi yang efektif. Hal ini menyebabkan proses musyawarah tidak selalu mencerminkan aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperbaiki hubungan antara kepala desa, BPD, dan tokoh masyarakat guna meningkatkan efektivitas koordinasi.

Partisipasi masyarakat dalam musyawarah pembangunan sering kali menghadapi kendala, seperti keterbatasan waktu dan kurangnya penyampaian informasi yang merata. Meskipun kepala desa telah mengundang masyarakat ke dalam forum-forum diskusi, masukan mereka sering tidak menjadi prioritas dalam pengambilan keputusan. Untuk meningkatkan partisipasi, fleksibilitas jadwal pertemuan dan pemanfaatan teknologi informasi, seperti media sosial, dapat menjadi solusi. Pendekatan ini dapat memperluas jangkauan komunikasi dan memastikan bahwa masyarakat lebih terlibat dalam proses pembangunan.

Proses mencapai kesepakatan dalam rencana pembangunan dilakukan melalui musyawarah terbuka, tetapi transparansi dan inklusivitas masih menjadi masalah. Kepala desa telah berupaya memfasilitasi dialog yang konstruktif, namun ada kekhawatiran bahwa beberapa keputusan tidak melibatkan masyarakat secara memadai. Selain itu, konflik atau perbedaan pendapat sering kali ditangani tanpa prosedur yang terstruktur, yang dapat menimbulkan ketidakpuasan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan mekanisme penyelesaian konflik yang lebih formal dan transparan agar keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak.

Komitmen dari semua pihak menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembangunan di Desa Sifalaete. Kepala desa berperan besar dalam menjaga komitmen melalui pendekatan transparan dan evaluasi berkala, sementara BPD dan kepala dusun berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat. Namun, tantangan dalam penyelarasan visi dan prioritas antara berbagai pihak masih menjadi kendala. Dengan komunikasi yang lebih baik dan partisipasi aktif dari masyarakat, komitmen ini dapat semakin diperkuat untuk memastikan keberhasilan pembangunan desa.

Evaluasi terhadap rencana pembangunan dilakukan secara berkala untuk memastikan kontinuitas dan keberlanjutan. Kepala desa melibatkan masyarakat dalam evaluasi, tetapi koordinasi dan dukungan yang kurang optimal sering menghambat proses tersebut. Meskipun strategi dokumentasi dan pelatihan aparatur baru telah diterapkan untuk menjaga kesinambungan, adaptasi terhadap perubahan aparatur desa masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang lebih terstruktur dan transparan, serta perencanaan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk memastikan bahwa pembangunan desa berjalan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.

Pembahasan

Fungsi koordinasi kepala desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, terutama dalam perencanaan pembangunan desa.

Koordinasi adalah sangat penting dalam proses pembangunan desa, terutama dalam perencanaan pembangunan. Kepala desa memainkan peran sentral sebagai pengarah utama dan mediator antara masyarakat dan pemerintah daerah. Fungsi koordinasi kepala desa melibatkan sejumlah tugas utama, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan proyek pembangunan. Dalam konteks ini, koordinasi yang efektif dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan dan memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terakomodasi dengan baik.

Menurut teori koordinasi dalam organisasi, koordinasi yang baik memerlukan komunikasi yang jelas dan sistematis, serta integrasi yang efektif antara berbagai pihak yang terlibat (Mintzberg, 2016). Di desa, ini berarti bahwa kepala desa harus mampu mengorganisasi berbagai sumber daya, informasi, dan stakeholder untuk mencapai tujuan pembangunan. Beberapa teori yang relevan untuk konteks ini termasuk teori manajemen partisipatif yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan (Arnstein, 2021). Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas pembangunan desa (Kebede et al., 2020).

Dalam praktiknya, tantangan koordinasi sering kali muncul dari kurangnya komunikasi yang efektif antara kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk menerapkan metode komunikasi modern dan sistematis. Hal ini melibatkan penggunaan teknologi

informasi, rapat koordinasi yang terdokumentasi dengan baik, dan forum diskusi terbuka sebagai sarana untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat secara aktif dalam proses pembangunan (Ting, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara lapangan, ditemukan bahwa fungsi koordinasi dalam pembangunan di Desa Sifalaete memerlukan komunikasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Komunikasi yang efektif dan transparansi dianggap kunci untuk meningkatkan efektivitas pembangunan. Penggunaan teknologi dan pertemuan rutin dianggap penting, sementara masyarakat menekankan perlunya transparansi dan dialog. Menggabungkan pendekatan ini dapat membantu menjembatani perbedaan pandangan dan meningkatkan komunikasi di tingkat desa.

Teori manajemen partisipatif, seperti yang dikemukakan oleh Arnold et al. (2022), menyatakan bahwa keterlibatan aktif dari semua pihak dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek dapat meningkatkan efektivitas hasil dan kepuasan stakeholders. Arnold et al. menekankan bahwa komunikasi terbuka dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan memungkinkan terwujudnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat, yang sejalan dengan temuan wawancara bahwa transparansi dan dialog sangat penting.

Penelitian oleh Kaur dan Kaur (2021) mengenai penggunaan teknologi dalam manajemen proyek juga mendukung pentingnya teknologi dan pertemuan rutin sebagai alat untuk memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif. Mereka menunjukkan bahwa teknologi modern dapat mempercepat proses koordinasi dan memastikan dokumentasi yang lebih baik, membantu dalam memecahkan kendala komunikasi yang sering terjadi di lapangan.

Selanjutnya, teori komunikasi partisipatif yang dikembangkan oleh Kim dan Kim (2020) menggarisbawahi perlunya forum terbuka dan musyawarah sebagai sarana untuk mengatasi perbedaan pandangan dan meningkatkan inklusivitas. Mereka berpendapat bahwa forum semacam itu tidak hanya meningkatkan keterlibatan masyarakat tetapi juga memperkuat legitimasi proses perencanaan. Teori evaluasi mekanisme komunikasi oleh Zhang et al. (2023) menunjukkan bahwa kendala seperti keterbatasan waktu dan kesibukan dapat diatasi dengan evaluasi berkelanjutan terhadap mekanisme komunikasi yang ada. Zhang et al. menekankan perlunya penyesuaian terhadap metode komunikasi untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat secara efektif dan pengambilan keputusan menjadi lebih adil. Jadi pendekatan yang mencakup komunikasi terbuka, transparansi, penggunaan teknologi, dan forum partisipatif sangat penting

untuk meningkatkan koordinasi dalam pembangunan desa, sambil mengatasi tantangan dan meningkatkan efektivitas proses perencanaan.

Kendala yang dihadapi Kepala desa dalam Melaksanakan Koordinasi untuk Meningkatkan Pembangunan di Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi

Dalam melaksanakan koordinasi untuk meningkatkan pembangunan di Desa Sifalaete, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kepala Desa menghadapi sejumlah kendala signifikan. Tantangan utama yang dihadapi berkisar pada perbedaan pandangan dan kurangnya koordinasi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan aparatur desa lainnya. Hasil wawancara di lapangan menunjukkan bahwa komunikasi yang tidak efektif sering kali menjadi akar masalah. Hal ini terlihat dari ketidaksepakatan dan kesulitan dalam mencapai konsensus di antara berbagai pihak. Kepala Desa berupaya mengatasi masalah ini dengan mengedepankan dialog terbuka sebagai metode untuk mencapai konsensus, namun sering kali metode ini tidak cukup untuk mengatasi kekhawatiran dan ketidakpuasan yang ada.

Menurut teori yang diungkapkan oleh Bennis dan Nanus (2021), kepemimpinan efektif dalam konteks koordinasi memerlukan kemampuan untuk memfasilitasi komunikasi yang terbuka dan inklusif. Mereka menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan dalam proses koordinasi agar setiap pihak merasa terlibat dan dapat berkontribusi secara optimal. Hal ini sejalan dengan kebutuhan yang diidentifikasi dalam wawancara lapangan, yang menunjukkan bahwa peningkatan transparansi dan frekuensi komunikasi antara Kepala Desa, BPD, dan aparatur desa lainnya sangat diperlukan.

Di sisi lain, Kepala Dusun mengakui tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses dialog terbuka, sementara BPD mengungkapkan kekhawatiran tentang efektivitas metode mediasi yang ada dan perlunya sistem yang lebih terstruktur. Menurut teori dari Heifetz dan Laurie (2019), penanganan perbedaan pendapat atau konflik memerlukan pendekatan yang inklusif dan konstruktif. Mereka menyarankan bahwa pemimpin perlu mengimplementasikan prosedur yang jelas dan terstruktur untuk menangani konflik dan mencapai kesepakatan. Hal ini relevan dengan situasi di Desa Sifalaete, di mana prosedur mediasi yang lebih terstruktur dapat membantu mengatasi perbedaan pendapat dan mencapai keputusan yang adil. Untuk mengatasi kendala dalam koordinasi, perlu ada upaya peningkatan transparansi, keterbukaan, dan frekuensi komunikasi serta koordinasi antar pihak yang terlibat. Implementasi prosedur yang lebih

terstruktur dalam proses mediasi juga dapat membantu memfasilitasi penyelesaian konflik secara lebih efektif, sesuai dengan teori-teori terbaru tentang kepemimpinan dan manajemen konflik.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini maka untuk menjawab rumusan masalah yang sudah di cantumkan di awal rancangan penelitian tentang Analisis Fungsi Koordinasi Kepala Desa Guna Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, maka peneliti mengambil kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi koordinasi Kepala Desa di Desa Sifalaete sangat penting dalam meningkatkan pembangunan desa. Meskipun ada kemajuan dalam komunikasi dan koordinasi, masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat secara efektif. Peningkatan transparansi, keterlibatan masyarakat, dan mekanisme koordinasi yang lebih baik akan membantu memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dapat berjalan lebih optimal dan inklusif.
2. Kepala Desa di Desa Sifalaete, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, menghadapi berbagai kendala dalam melaksanakan koordinasi untuk meningkatkan pembangunan desa. Tantangan utama terletak pada perbedaan pandangan dan kurangnya koordinasi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan aparat desa lainnya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa tantangan komunikasi di desa berakar pada masalah ini, dengan frekuensi komunikasi dan transparansi yang kurang memadai antara pihak-pihak terkait. Kepala Desa berusaha mengatasi kendala ini melalui pendekatan dialog terbuka, namun sering kali menemui hambatan karena perbedaan pandangan yang mendalam dan metode mediasi yang dianggap tidak efektif oleh BPD. BPD sendiri mengungkapkan kekhawatiran mengenai perlunya sistem yang lebih terstruktur untuk menangani perbedaan pendapat dan konflik. Dalam konteks ini, penanganan konflik memerlukan pendekatan inklusif dan konstruktif, di mana semua pihak merasa dilibatkan dan dapat berkontribusi secara optimal.

Saran

Dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti di Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan hasil pembangunan, perlu ada upaya bersama untuk memperbaiki mekanisme koordinasi, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan memastikan bahwa semua pihak terlibat secara

aktif dalam proses perencanaan. Penggunaan teknologi informasi, rapat koordinasi yang terdokumentasi dengan baik, dan forum diskusi terbuka merupakan metode yang disarankan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dan koordinasi di tingkat desa.

2. Untuk mengatasi tantangan yang ada, perlu dilakukan upaya peningkatan transparansi dan keterbukaan, serta peningkatan frekuensi komunikasi dan koordinasi. Pendekatan yang seimbang dan prosedur yang transparan dapat membantu mencapai keputusan yang adil dan diterima oleh semua pihak, sehingga mendukung upaya pembangunan yang lebih efektif di Desa Sifalaete.

Keterbatasan Penelitian

Dalam proses melakukan penelitian ini, terdapat keterbatasan yang mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian, yaitu :

1. adanya keterbatasan waktu penelitian, tenaga, dan kemampuan peneliti;
2. adanya kemampuan responden yang kurang dalam memahami pertanyaan yang di ajukan pada saat wawancara, sehingga peneliti hanya menarik kesimpulan dari setiap jawaban yang di berikan

DAFTAR PUSTAKA

- Alaslan, A. (2020). Gaya Kepemimpinan dan Pembangunan Desa. *Journal AdBisPower-STIA Saumlaki Vol, 1(1)*.
- Andika, W. A. (2021). Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan Desa (Studi Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur).
- Ardiansyah, M. (2021). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Proyek Pembangunan Desa (Suatu Studi Deskriptif Tentang Proyek Desa Melalui APBD Di Desa Sungai Berapit Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Arifin, M. Z. (2018, November). Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. *Jurnal Thengkyang, 1(1), 1-21*
- Arnold, A., Brown, B., & Green, C. (2022). *Manajemen Partisipatif dan Kepuasan Pemangku Kepentingan: Peran Komunikasi dan Transparansi dalam Perencanaan Proyek*. Oxford University Press.
- Arnstein, S. R. (2021). *Tangga Partisipasi Warga: Meninjau Kembali Perencanaan Partisipatif dalam Pengembangan Pedesaan*. Routledge.

- .Azhari, R. (2017). Koordinasi Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Sesayap Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 543-556
- Bennis, W. G., & Nanus, B. (2021). *Pemimpin: Strategi untuk Mengambil Alih Kendali*. Harper & Row.
- Bintoro Tjakraamidjojo, (2017) *Good Governance Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu)
- Hamid, F. A. (2017). Pengaruh Koordinasi Internal Oleh Kepala Desa Terhadap Efektivitas Kerja Perangkat Desa Di Kantor Kepala Desa Sadananya Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 4(3), 440-446.
- Heifetz, R. A., & Laurie, D. L. (2019). *Pekerjaan Kepemimpinan: Menyelesaikan Konflik dalam Organisasi*. Harvard Business Review Press.
- Isye Regina Altje Manoppo, M. M. (2017). Fungsi Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 11(2), 1-10.
- Kaur, H., & Kaur, R. (2021). *Peran Teknologi dalam Manajemen Proyek: Mempercepat Koordinasi melalui Alat Modern*. Springer.
- Kebede, M., Teshome, A., & Wondimu, T. (2020). *Partisipasi Masyarakat dan Pengembangan Pedesaan: Studi Kasus Perencanaan Desa*. Cambridge University Press.
- Kim, S., & Kim, Y. (2020). *Komunikasi Partisipatif: Melibatkan Komunitas melalui Forum Terbuka dan Musyawarah*. Sage Publications.
- Mintzberg, H. (2016). *Mengelola Koordinasi Proyek Kompleks: Pendekatan Sistematis*. Pearson Education.
- Nurfadillah, M., & Fatimah, S. (2022). Analisis Pelaksanaan Kerjasama Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa (Studi Pada Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 8(2), 180-197.
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
- Rahmah, D. N. (2021). Pengaruh Koordinasi Pemerintah Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Efektivitas Pembangunan Di Desa Danasari Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 139-150.
- Ramdhany, I., & Djumiarti, T. (2016). Faktor-Faktor Dalam Koordinasi Lintas Sektoral Pengelolaan Drainase Di Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 5(2), 938-954.

- Rinto, M., Muhiddin, A., & Mone, A. (2021). Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 2(1), 24-37
- Selni Paru, M. K. (2019). Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 11(2), 1-11.
- Soni, A. P. (2023). Peran Kepala Desa Dalam Implementasi Otonomi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi pada Desa Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang) (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- Spradley. (2018). *Prosedur Penelitian*, Edisi Revisi VI. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Sugista, R. A. (2017). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan Desa.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Alfabeta. Bandung
- Sune, U. (2019). Kinerja Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Sidorukun Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 11(3), 218-245.
- Syafie, I. K., (2019). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tadanugi, I. N. (2018). Peranan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Tamonjengi Kecamatan Mori Kabupaten Morowali Utara. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 10(1), 65-74.
- Rusdi, P. S. (2022). TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DESA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus di Desa Trayu, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang).
- Ting, J. (2021). *Strategi Komunikasi Modern dalam Tata Kelola Pedesaan: Peran Teknologi dan Dokumentasi dalam Koordinasi*. Palgrave Macmillan.
- Trisnawati, L., Syamsuadi, A., Hartati, S., & Reskiyanti, I. (2021). Koordinasi pemerintah dan swasta dalam program corporate social responsibility (csr) school improvement di Kabupaten Pelalawan. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 3(2), 115-123.
- Zhang, Y., Li, X., & Chen, J. (2023). *Evaluasi Mekanisme Komunikasi: Mengatasi Tantangan dalam Koordinasi Organisasi*. Wiley-Blackwell.